



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;

ALP

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah -Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

af

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398),
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4/1

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 701);

uff

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2012 Nomor 107);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2013 Nomor 159);
25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.827.683.912.000.- bertambah sejumlah Rp. 36.908.997.135.- Sehingga menjadi Rp. 1.864.592.909.135.- dengan rincian sebagai berikut:

Kt

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 1.827.683.912.000.-

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 36.908.997.135.-

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp. 1.864.592.909.135.-

2. Belanja

a. Semula

Rp. 1.827.683.912.000.-

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp. 133.246.825.070.-

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp. 1.960.930.737.070.-

Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan

(Rp. 96.337.827.935.-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 0.-

2) Bertambah/(Berkurang)

Rp. 96.337.827.935.-

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan

Rp. 96.337.827.935.-

b. Pengeluaran

1) Semula

Rp. 0.-

2) Bertambah/Berkurang

Rp. 96.337.827.935.-

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan

Rp. 0.-

AKF

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Rp. 96.337.827.935.-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan

Rp. 0.-

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan rincian obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran Ia, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BT

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

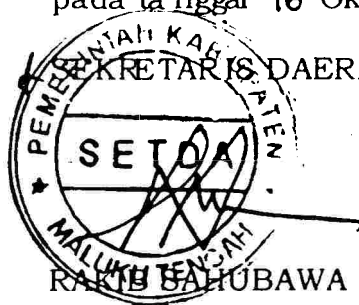
Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2019

“B” UP MALUKU TENGAH, f. f

TUASIKALABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 16 Oktober 2019

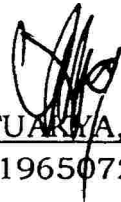
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH, f



BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 448

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH



M. TUAKYA, SH, MH

NIP.19650720 200003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, timbul hak dan kewajiban daerah yang harus dirumuskan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban yang disetujui bersama antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah setelah disetujui oleh Gubernur untuk dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku selama satu (1) tahun anggaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri



Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/08/NK/2019 dan Nomor 903/29/2019 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 904/09/NK/2019 dan Nomor 903/30/2019 Tahun 2019 tentang Prioritas dan Plapon Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Pada prinsipnya Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD merupakan manifestasi rencana strategis RPJMD, RKPD, Renstra dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah untuk membangun Kabupaten Maluku Tengah selama 5 tahun. Bahwa Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plapon Anggaran Tahun Anggaran 2019 yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 September 2018.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran yang dijelaskan diatas maka aspek-aspek yang menjadi muatan pada Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan perkiraan-perkiraan tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang dapat dinilai dengan uang untuk mendanai program dan kegiatan pemerintah daerah selama satu (1) tahun anggaran. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang merupakan hak daerah dalam satu (1) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan diatas bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Dana Perimbangan; dan
- c. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Sah.



2. Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konguren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja Daerah terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung; dan

b. Belanja Langsung;

▪ Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Subsidi;
3. Belanja Hibah;
4. Belanja Bantuan Sosial;
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa; dan
6. Belanja Tidak Terduga.

▪ Belanja Langsung terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa; dan
- c. Belanja Modal.



3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan sumber pendanaan untuk menutupi defisit anggaran dikarenakan anggaran belanja daerah lebih besar dari anggaran pendapatan daerah yang tersedia dalam Perubahan APBD. Surplus atau defisit Perubahan APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

Pembiayaan daerah terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal2

Lampiran I dan Lampiran Ia Peraturan Bupati adalah Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD dan Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD berdasarkan obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 yang memuat tentang:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal3

- a. Lampiran II Peraturan Bupati adalah Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 menurut Urusan Pemerintahan yang memuat Penjabaran Program Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah.

- b. Lampiran III Peraturan Bupati adalah daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Hibah Daerah yang diterima.
- c. Lampiran IV Peraturan Bupati adalah daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi Bantuan Sosial daerah yang diterima.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas





PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN AANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN	1.827.683.912.000,00	1.864.592.909.135,00	36.908.997.135,00	2,02
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.566.758.000,00	84.857.848.000,00	5.291.090.000,00	6,65
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.514.272.000,00	23.725.362.000,00	2.211.090.000,00	10,28
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.052.486.000,00	35.132.486.000,00	3.080.000.000,00	9,61
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.440.982.707.000,00	1.458.063.843.688,00	17.081.136.688,00	1,19
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.236.408.000,00	15.790.544.688,00	1.554.136.688,00	10,92
1.2.2	Dana Alokasi Umum	992.833.340.000,00	992.833.340.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	433.912.959.000,00	449.439.959.000,00	15.527.000.000,00	3,58
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	307.134.447.000,00	321.671.217.447,00	14.536.770.447,00	4,73
1.3.1	Pendapatan Hibah	239.254.309.000,00	239.254.309.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.000.000.000,00	49.536.770.447,00	14.536.770.447,00	41,53
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.880.138.000,00	32.880.138.000,00	0,00	0,00
2	BELANJA	1.827.683.912.000,00	1.960.930.737.070,00	133.246.825.070,00	7,29
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.055.191.290.700,00	1.097.902.182.204,00	42.710.891.504,00	4,05
2.1.1	Belanja Pegawai	736.163.010.700,00	751.124.004.781,00	14.960.994.081,00	2,03
2.1.3	Belanja Subsidi	4.700.000.000,00	5.610.393.000,00	910.393.000,00	19,37
2.1.4	Belanja Hibah	13.805.400.000,00	18.010.900.000,00	4.205.500.000,00	30,46
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.515.462.000,00	6.515.462.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	280.007.418.000,00	307.212.572.423,00	27.205.154.423,00	9,72
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	9.428.850.000,00	(4.571.150.000,00)	(32,65)
2.2	BELANJA LANGSUNG	772.492.621.300,00	863.028.554.866,00	90.535.933.566,00	11,72
2.2.1	Belanja Pegawai	35.783.393.950,00	36.558.460.950,00	775.067.000,00	2,17
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.937.137.700,00	363.192.630.286,00	48.255.492.586,00	15,32
2.2.3	Belanja Modal	421.772.089.650,00	463.277.463.630,00	41.505.373.980,00	9,84
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(96.337.827.935,00)	(96.337.827.935,00)	0,00

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

MASOHI, 16 Oktober 2019

BUPATI MALUKU TENGAH

[Signature]

TUASIKU ABUA

MALUKU TENGAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4	PENDAPATAN	1.827.683.912.000,00	1.864.592.909.135,00	36.908.997.135,00	2,02	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	79.566.758.000,00	84.857.848.000,00	5.291.090.000,00	6,65	
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	26.000.000.000,00	26.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.01.12	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 17 Tahun 2012 ttg Pajak Hotel
4.1.1.02	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.02.01	Restoran	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 19 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran
4.1.1.03	Pajak Hiburan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.03.10	Permainan Biliar	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda No. 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan
4.1.1.04	Pajak Reklame	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 01 Tahun 2018 ttg Pajak Reklame
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	0,00	Perda No 02 Thn 2018 ttg Pajak Penerangan Jalan
4.1.1.06	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.06.40	Mineral Bukan Logam dan Lainnya	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 18 Tahun 2012
4.1.1.11	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.11.01	PBB Sektor Perkotaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 23 Tahun 2013
4.1.1.11.02	PBB Sektor Perdesaan	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 23 Tahun 2013
4.1.1.12	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.1.12.01	BPHTB - Pemindahan Hak	2.800.000.000,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 20 Tahun 2012
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	21.514.272.000,00	23.725.362.000,00	2.211.090.000,00	10,28	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19.152.322.000,00	19.152.322.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 14 Tahun 2007
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	77.000.000,00	77.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 6 Tahun 2018
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah	15.421.362.000,00	15.421.362.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.07	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.01.19	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 28 Tahun 2012
4.1.2.01.20	Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran	93.960.000,00	93.960.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 28 Tahun 2012
4.1.2.01.21	Retribusi Pelayanan Pasar - Los	33.920.000,00	33.920.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 28 Tahun 2012
4.1.2.01.22	Retribusi Pelayanan Pasar - Kios	2.311.580.000,00	2.311.580.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 36 Tahun 2018
4.1.2.01.45	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kendaraan	129.500.000,00	129.500.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.640.950.000,00	3.852.040.000,00	2.211.090.000,00	134,74	
4.1.2.02.03	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Ruangan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	SK Gub. Nomor 111 Tahun 2003
4.1.2.02.13	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	134.160.000,00	134.160.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 37 Tahun 2018 ttg Terminal
4.1.2.02.15	Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	34.000.000,00	34.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 11 Tahun 1999 ttg Terminal
4.1.2.02.16	Retribusi Tempat Khusus Parkir	53.040.000,00	53.040.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 3 Tahun 2018
4.1.2.02.18	Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.20	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	503.840.000,00	503.840.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 24 Tahun 2012
4.1.2.02.22	Retribusi Tempat Pariwisata	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.02.31	Retribusi Hasil Perikanan	40.910.000,00	2.252.000.000,00	2.211.090.000,00	5.404,77	
4.1.2.02.32	Retribusi Rumah Potong Hewan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 26.a Tahun 2012
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	721.000.000,00	721.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 25 Tahun 2012
4.1.2.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 26 Tahun 2012
4.1.2.03.05	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi	113.500.000,00	113.500.000,00	0,00	0,00	Perda Nomor 14 Tahun 2018
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	32.052.486.000,00	35.132.486.000,00	3.080.000.000,00	9,61	
4.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.03	Penerimaan Bunga Deposito	6.920.000.000,00	10.000.000.000,00	3.080.000.000,00	44,51	
4.1.4.03.01	Rekening Deposito Pada Bank	6.920.000.000,00	10.000.000.000,00	3.080.000.000,00	44,51	
4.1.4.14	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.14.01	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	
4.1.4.22	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	24.052.486.000,00	24.052.486.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.1.4.22.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	24.052.486.000,00	24.052.486.000,00	0,00	0,00	
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.440.982.707.000,00	1.458.063.843.688,00	17.081.136.688,00	1,19	
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.236.408.000,00	15.790.544.688,00	1.554.136.688,00	10,92	
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	11.565.270.000,00	11.565.270.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8.725.602.000,00	8.725.602.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	2.839.668.000,00	2.839.668.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.671.138.000,00	4.225.274.688,00	1.554.136.688,00	58,18	
4.2.1.02.07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	2.537.729.688,00	1.554.136.688,00	158,01	
4.2.1.02.09	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	33.844.000,00	33.844.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara	561.600.000,00	561.600.000,00	0,00	0,00	
4.2.1.02.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan	1.092.101.000,00	1.092.101.000,00	0,00	0,00	
4.2.2	Dana Alokasi Umum	992.833.340.000,00	992.833.340.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	992.833.340.000,00	992.833.340.000,00	0,00	0,00	
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	992.833.340.000,00	992.833.340.000,00	0,00	0,00	
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	433.912.959.000,00	449.439.959.000,00	15.527.000.000,00	3,58	
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	132.712.294.000,00	132.712.294.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.01	DAK Reguler Bidang Pendidikan	63.575.051.000,00	63.575.051.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.02	DAK Reguler Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar	10.399.999.000,00	10.399.999.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.05	DAK Reguler Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah	1.525.000.000,00	1.525.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.06	DAK Reguler Bidang Pariwisata	3.618.619.000,00	3.618.619.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.08	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	2.068.255.000,00	2.068.255.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.09	DAK Reguler Bidang Pertanian	4.410.238.000,00	4.410.238.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.11	DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Keluarga Berencana	1.476.718.000,00	1.476.718.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.22	DAK Bidang Kesehatan - Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	8.674.608.000,00	8.674.608.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.23	DAK Bidang Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	7.182.196.000,00	7.182.196.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.24	DAK Reguler Bidang Air Minum	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.25	DAK Reguler Bidang Sanitasi	1.740.108.000,00	1.740.108.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.01.27	DAK Reguler Bidang Jalan	25.791.502.000,00	25.791.502.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Affirmasi	46.804.519.000,00	46.804.519.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.01	DAK AFFIRMASI Bidang Air Minum	2.368.409.000,00	2.368.409.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.02	DAK AFFIRMASI Bidang Sanitasi	3.734.034.000,00	3.734.034.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.2.3.03.03	DAK AFFIRMASI Bidang Perumahan dan Permukiman	2.991.582.000,00	2.991.582.000,00	0,00	0,00	Pepres Nomor 97 Tahun 2016 Pepres Nomor 97 Tahun 2016 Pepres Nomor 97 Tahun 2016
4.2.3.03.04	DAK AFFIRMASI Bidang Transportasi	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.05	DAK AFFIRMASI Bidang Pendidikan SD	17.143.964.000,00	17.143.964.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.06	DAK AFFIRMASI Bidang Pendidikan SMP	833.632.000,00	833.632.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.03.07	DAK AFFIRMASI Bidang Kesehatan - Penguatan Puskesmas DTPK	11.232.898.000,00	11.232.898.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	176.190.378.000,00	191.717.378.000,00	15.527.000.000,00	8,81	
4.2.3.04.01	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini	3.542.400.000,00	3.542.400.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.02	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Kesehatan	40.515.309.000,00	40.515.309.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.03	Akreditasi Rumah Sakit	372.440.000,00	372.440.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.04	Akreditasi Puskesmas	5.324.588.000,00	5.324.588.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.05	Jaminan Persalinan	3.507.000.000,00	3.507.000.000,00	0,00	0,00	Kepmendikbud Nomor 320/P/2019 Kepmendikbud Nomor 320/P/2019
4.2.3.04.06	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.149.847.000,00	5.149.847.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.07	DAK Non Fisik - Tunjangan Profesi Guru PNSD	102.413.561.000,00	102.413.561.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.08	DAK Non Fisik - Tambahan Penghasilan Guru PNSD	3.741.000.000,00	3.741.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.09	DAK Non Fisik - Tunjangan Khusus Guru	8.258.525.000,00	8.258.525.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.10	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.914.928.000,00	1.914.928.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.12	DAK Non Fisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	892.200.000,00	892.200.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.13	DAK Non Fisik - Dana Pelayanan Kepariwisataaan	558.580.000,00	558.580.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.04.14	Bantuan Operasional Sekolah Afirnasi	0,00	14.302.000.000,00	14.302.000.000,00	0,00	
4.2.3.04.15	Bantuan Operasional Sekolah Kinerja	0,00	1.225.000.000,00	1.225.000.000,00	0,00	
4.2.3.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	78.205.768.000,00	78.205.768.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.01	DAK Penugasan Bidang Kesehatan Rujukan	50.471.891.000,00	50.471.891.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.02	DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.025.496.000,00	2.025.496.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.03	DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.875.000.000,00	3.875.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.04	DAK Penugasan Bidang Jalan	12.901.222.000,00	12.901.222.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.06	DAK Penugasan Bidang Kesehatan Penurunan Stunting	1.677.999.000,00	1.677.999.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.07	DAK Penugasan Bidang Kesehatan Pengendalian Penyakit	3.284.146.000,00	3.284.146.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.08	DAK Penugasan Bidang Pasar	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	0,00	0,00	
4.2.3.05.09	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.270.014.000,00	2.270.014.000,00	0,00	0,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	307.134.447.000,00	321.671.217.447,00	14.536.770.447,00	4,73	
4.3.1	Pendapatan Hibah	239.254.309.000,00	239.254.309.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	179.993.709.000,00	179.993.709.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	179.993.709.000,00	179.993.709.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4.3.1.02	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Daerah Lainnya	59.260.60 0.000,00	59.260.600.000,00	0,00	0,00	
4.3.1.02.01	Pemerintah Daerah	59.260.600.000,00	59.260.600.000,00	0,00	0,00	
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	35.000.000.000,00	49.536.770.447,00	14.536.770.447,00	41,53	
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	24.766.979.000,00	32.020.655.500,00	7.253.676.500,00	29,29	
4.3.3.01.01	Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	24.766.979.000,00	32.020.655.500,00	7.253.676.500,00	29,29	
4.3.3.02	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.233.021.000,00	17.516.114.947,00	7.283.093.947,00	71,17	
4.3.3.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	10.233.021.000,00	17.516.114.947,00	7.283.093.947,00	71,17	
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	32.880.138.000,00	32.880.138.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01	Dana Penyesuaian	32.880.138.000,00	32.880.138.000,00	0,00	0,00	
4.3.4.01.03	Dana Insentif Daerah	32.880.138.000,00	32.880.138.000,00	0,00	0,00	
5	BELANJA	1.827.683.912.000,00	1.960.930.737.070,00	133.246.825.070,00	7,29	
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.055.191.290.700,00	1.097.902.182.204,00	42.710.891.504,00	4,05	
5.1.1	Belanja Pegawai	736.163.010.700,00	751.124.004.781,00	14.960.994.081,00	2,03	
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	676.764.644.700,00	690.600.938.781,00	13.836.294.081,00	2,04	
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	429.722.005.200,00	423.652.463.564,00	(6.069.541.636,00)	(1,41)	
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	40.499.996.000,00	40.286.294.092,00	(213.701.908,00)	(0,53)	
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.590.235.000,00	7.680.315.000,00	90.080.000,00	1,19	
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	30.000.099.000,00	29.552.628.000,00	(447.471.000,00)	(1,49)	
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	6.860.703.000,00	7.091.540.000,00	230.837.000,00	3,36	
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	23.793.520.000,00	23.792.706.600,00	(813.400,00)	0,00	
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	682.718.000,00	787.821.540,00	105.103.540,00	15,39	
5.1.1.01.08	P e m b u l a n Gaji	64.500.000,00	64.073.071,00	(426.929,00)	(0,66)	
5.1.1.01.09	Iuran BPJS Kesehatan	13.853.090.000,00	13.854.550.000,00	1.460.000,00	0,01	
5.1.1.01.10	Uang Paket	76.128.000,00	76.128.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	26.675.200,00	26.675.200,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	51.521.400,00	51.521.400,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	30.876.300,00	30.876.300,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	10.048.700,00	10.048.700,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	21.375.900,00	21.375.900,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.301.250.000,00	4.301.250.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	365.085.000,00	372.960.000,00	7.875.000,00	2,16	
5.1.1.01.19	Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000,00	312.480.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	1.064.543.000,00	1.064.543.000,00	0,00	0,00	PP Nomor 18 Tahun 2017 PP Nomor 18 Tahun 2017
5.1.1.01.22	Iuran Jaminan Kematian	1.263.709.000,00	2.784.012.504,00	1.520.303.504,00	120,30	
5.1.1.01.23	Tunjangan Reses	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.24	Tunjangan Transportasi	4.662.000.000,00	4.662.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.01.25	Tunjangan Profesi Guru	102.413.561.000,00	121.026.150.910,00	18.612.589.910,00	18,17	
5.1.1.01.26	Tunjangan Khusus Guru	8.258.525.000,00	8.258.525.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	51.390.210.000,00	52.405.820.000,00	1.015.610.000,00	1,98	
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	47.649.210.000,00	48.664.820.000,00	1.015.610.000,00	2,13	
5.1.1.02.06	Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS Daerah	3.741.000.000,00	3.741.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	5.358.267.000,00	5.358.267.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD	5.040.000.000,00	5.040.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	318.267.000,00	318.267.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.241.379.000,00	1.241.379.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.04.01	Biaya Pemungutan PBB	1.241.379.000,00	1.241.379.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.07	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.08	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.09	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.10	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.11	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.15	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	470.000.000,00	470.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.16	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.05.17	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	108.510.000,00	217.600.000,00	109.090.000,00	100,53	
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	50.100.000,00	50.100.000,00	0,00	0,00	
5.1.1.06.18	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan	40.910.000,00	150.000.000,00	109.090.000,00	266,66	
5.1.1.06.24	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	0,00	
5.1.3	Belanja Subsidi	4.700.000.000,00	5.610.393.000,00	910.393.000,00	19,37	
5.1.3.01	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	4.700.000.000,00	5.610.393.000,00	910.393.000,00	19,37	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.1.3.01.02	Belanja Subsidi kepada Lembaga	4.700.000.000,00	5.610.393.000,00	910.393.000,00	19,37	
5.1.4	Belanja Hibah	13.805.400.000,00	18.010.900.000,00	4.205.500.000,00	30,46	
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	10.263.000.000,00	13.983.000.000,00	3.720.000.000,00	36,25	
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi.....	10.263.000.000,00	13.983.000.000,00	3.720.000.000,00	36,25	
5.1.4.08	Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Masyarakat/Swasta	3.542.400.000,00	3.526.800.000,00	(15.600.000,00)	(0,44)	
5.1.4.08.01	BOP PAUD Masyarakat/Swasta	3.542.400.000,00	3.526.800.000,00	(15.600.000,00)	(0,44)	
5.1.4.09	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan	0,00	501.100.000,00	501.100.000,00	0,00	
5.1.4.09.01	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan	0,00	501.100.000,00	501.100.000,00	0,00	
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.515.462.000,00	6.515.462.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	6.515.462.000,00	6.515.462.000,00	0,00	0,00	
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada	6.515.462.000,00	6.515.462.000,00	0,00	0,00	
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	280.007.418.000,00	307.212.572.423,00	27.205.154.423,00	9,72	
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	278.921.511.000,00	306.126.665.423,00	27.205.154.423,00	9,75	
5.1.7.03.01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	278.921.511.000,00	306.126.665.423,00	27.205.154.423,00	9,75	
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.085.907.000,00	1.085.907.000,00	0,00	0,00	
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.085.907.000,00	1.085.907.000,00	0,00	0,00	
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	9.428.850.000,00	(4.571.150.000,00)	(32,65)	
5.1.8.01	Belanja Tak Terduga	14.000.000.000,00	9.428.850.000,00	(4.571.150.000,00)	(32,65)	
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	14.000.000.000,00	9.428.850.000,00	(4.571.150.000,00)	(32,65)	
5.2	BELANJA LANGSUNG	772.492.621.300,00	863.028.554.866,00	90.535.933.566,00	11,72	
5.2.1	Belanja Pegawai	35.783.393.950,00	36.558.460.950,00	775.067.000,00	2,17	
5.2.1.01	Honorarium PNS	14.887.259.600,00	15.752.124.600,00	864.865.000,00	5,81	
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	14.591.674.600,00	15.464.999.600,00	873.325.000,00	5,99	
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	225.585.000,00	219.815.000,00	(5.770.000,00)	(2,56)	
5.2.1.01.04	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	70.000.000,00	67.310.000,00	(2.690.000,00)	(3,84)	
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	2.983.244.350,00	3.072.144.350,00	88.900.000,00	2,98	
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorir/Tidak Tetap	2.983.244.350,00	3.072.144.350,00	88.900.000,00	2,98	
5.2.1.03	Uang Lembur	1.992.029.000,00	1.813.331.000,00	(178.698.000,00)	(8,97)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.980.437.000,00	1.801.739.000,00	(178.698.000,00)	(9,02)	SE Nomor 971-7791 Tahun 2018
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.04	Belanja Pegawai Dana BOS	8.889.090.000,00	8.889.090.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai Dana BOS	8.889.090.000,00	8.889.090.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.07	Honorarium Pengelolaan Dana yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	7.031.771.000,00	7.031.771.000,00	0,00	0,00	
5.2.1.07.01	Honorarium Pengelolaan Dana yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	7.031.771.000,00	7.031.771.000,00	0,00	0,00	
5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	314.937.137.700,00	363.192.630.286,00	48.255.492.586,00	15,32	
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	8.696.739.350,00	9.064.171.350,00	367.432.000,00	4,22	
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	5.835.196.000,00	6.100.441.000,00	265.245.000,00	4,55	
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	10.770.000,00	10.520.000,00	(250.000,00)	(2,32)	
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	216.851.500,00	216.851.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya	293.451.000,00	293.388.000,00	(63.000,00)	(0,02)	
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih	1.213.565.600,00	1.214.515.600,00	1.350.000,00	0,11	
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	402.280.250,00	402.280.250,00	0,00	0,00	
5.2.2.01.08	Belanja Pengisian Tabung Gas	724.625.000,00	825.775.000,00	101.150.000,00	13,96	
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	15.315.240.350,00	15.615.094.850,00	299.854.500,00	1,96	
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	493.867.000,00	596.457.000,00	102.590.000,00	20,77	
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	203.375.000,00	353.375.000,00	150.000.000,00	73,76	
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	12.712.696.850,00	12.606.824.850,00	(105.872.000,00)	(0,83)	
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia dan Pupuk	649.028.000,00	655.028.000,00	6.000.000,00	0,92	
5.2.2.02.06	Belanja Persediaan Makanan Pokok	1.068.908.500,00	1.028.576.000,00	(40.332.500,00)	(3,77)	
5.2.2.02.07	Belanja Bahan Pelatihan	172.365.000,00	359.834.000,00	187.469.000,00	108,76	
5.2.2.02.08	Belanja Barang/Bahan Promosi	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	11.877.241.100,00	13.098.196.100,00	1.220.955.000,00	10,28	
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	363.672.000,00	360.432.000,00	(3.240.000,00)	(0,89)	
5.2.2.03.02	Belanja Air	407.155.000,00	467.055.000,00	59.900.000,00	14,71	
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	5.014.692.000,00	4.896.312.000,00	(118.380.000,00)	(2,36)	
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.087.821.100,00	3.163.571.100,00	1.075.750.000,00	51,53	
5.2.2.03.06	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	1.991.054.000,00	2.027.064.000,00	36.010.000,00	1,81	
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	37.704.000,00	40.494.000,00	2.790.000,00	7,40	
5.2.2.03.08	Belanja Sertifikasi	38.235.000,00	32.235.000,00	(6.000.000,00)	(15,69)	
5.2.2.03.12	Biaya Jasa Penyiaran	178.260.000,00	216.560.000,00	38.300.000,00	21,49	
5.2.2.03.13	Belanja Jasa Pengamanan	443.750.000,00	473.990.000,00	30.240.000,00	6,81	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.03.15	Belanja Jasa Dekorasi	189.373.000,00	208.138.000,00	18.765.000,00	9,91	
5.2.2.03.16	Jasa Kebersihan Kantor	1.085.370.000,00	1.172.190.000,00	86.820.000,00	8,00	
5.2.2.03.17	Belanja Pajak Bumi dan Bangunan	40.155.000,00	40.155.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	6.710.631.800,00	6.860.747.800,00	150.116.000,00	2,24	
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	889.527.500,00	966.693.500,00	77.166.000,00	8,67	
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	2.034.177.000,00	2.137.048.000,00	102.871.000,00	5,06	
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas	3.147.847.300,00	3.121.426.300,00	(26.421.000,00)	(0,84)	
5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	588.039.000,00	584.539.000,00	(3.500.000,00)	(0,60)	
5.2.2.05.07	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	51.041.000,00	51.041.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	10.454.756.250,00	11.141.202.850,00	686.446.600,00	6,57	
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	5.645.090.600,00	6.055.954.300,00	410.863.700,00	7,28	
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	2.386.402.150,00	2.643.034.550,00	256.632.400,00	10,75	
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	2.423.263.500,00	2.442.214.000,00	18.950.500,00	0,78	
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	862.303.600,00	1.190.553.600,00	328.250.000,00	38,07	
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	411.303.600,00	645.853.600,00	234.550.000,00	57,03	
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	447.000.000,00	540.700.000,00	93.700.000,00	20,96	
5.2.2.07.04	Belanja Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	1.278.370.000,00	1.463.780.000,00	185.410.000,00	14,50	
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	905.320.000,00	1.040.720.000,00	135.400.000,00	14,96	
5.2.2.08.02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	373.050.000,00	423.060.000,00	50.010.000,00	13,41	
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.623.973.500,00	1.901.881.400,00	277.907.900,00	17,11	
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	212.996.000,00	180.038.000,00	(32.958.000,00)	(15,47)	
5.2.2.10.02	Belanja Sewa Komputer Dan Printer	8.000.000,00	8.080.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Proyektor	4.800.000,00	14.300.000,00	9.500.000,00	197,92	
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Generator	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Tenda	426.627.500,00	468.977.500,00	42.350.000,00	9,93	
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System	951.900.000,00	1.210.915.900,00	259.015.900,00	27,21	
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	15.033.113.000,00	16.397.520.000,00	1.364.407.000,00	9,08	
5.2.2.11.01	Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai	670.460.000,00	670.460.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.11.02	Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	3.293.650.000,00	3.760.000.000,00	466.350.000,00	14,16	
5.2.2.11.03	Belanja Makanan Dan Minuman Tamu	2.694.520.000,00	2.722.520.000,00	28.000.000,00	1,04	
5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan	471.290.000,00	420.340.000,00	(50.950.000,00)	(10,81)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	6.824.773.000,00	7.535.780.000,00	711.007.000,00	10,42	
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	1.078.420.000,00	1.288.420.000,00	210.000.000,00	19,47	
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.270.930.000,00	1.369.050.000,00	98.120.000,00	7,72	
5.2.2.12.01	Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH	216.280.000,00	252.280.000,00	36.000.000,00	16,65	
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	85.000.000,00	141.980.000,00	56.980.000,00	67,04	
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	322.000.000,00	322.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	423.000.000,00	428.140.000,00	5.140.000,00	1,22	
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	224.650.000,00	224.650.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	476.385.000,00	885.300.000,00	408.915.000,00	85,84	
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	476.385.000,00	885.300.000,00	408.915.000,00	85,84	
5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1.774.756.000,00	1.773.666.000,00	(1.090.000,00)	(0,06)	
5.2.2.14.02	Belanja Pakaian Adat Daerah	76.200.000,00	76.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik Tradisional	461.290.000,00	460.200.000,00	(1.090.000,00)	(0,24)	
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Olahraga	803.341.000,00	803.341.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Khusus Pegelaran Seni	433.925.000,00	433.925.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	99.991.940.750,00	113.756.614.850,00	13.764.674.100,00	13,77	
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	55.425.895.750,00	63.463.848.750,00	8.037.953.000,00	14,50	
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	44.566.045.000,00	50.292.766.100,00	5.726.721.100,00	12,85	
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	217.900.000,00	982.900.000,00	765.000.000,00	351,08	
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	42.900.000,00	807.900.000,00	765.000.000,00	1.783,22	
5.2.2.16.03	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	2.751.074.400,00	3.043.035.200,00	291.960.800,00	10,61	
5.2.2.17.01	-Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan	1.325.233.400,00	1.380.330.200,00	55.096.800,00	4,16	
5.2.2.17.03	Belanja Bimbingan Teknis	1.425.841.000,00	1.662.705.000,00	236.864.000,00	16,61	
5.2.2.18	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.18.01	Belanja Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.19	Belanja Pemulangan Pegawai	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.19.01	Belanja Pemulangan Pegawai Yang Pensiun Dalam Daerah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	5.500.147.750,00	5.519.757.750,00	19.610.000,00	0,36	
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	428.660.000,00	428.660.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.757.354.000,00	1.802.754.000,00	45.400.000,00	2,58	
5.2.2.20.05	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.693.483.750,00	2.627.693.750,00	(65.790.000,00)	(2,44)	
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	13.100.000,00	13.100.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.20.07	Belanja Pemeliharaan Tanaman	112.100.000,00	152.100.000,00	40.000.000,00	35,68	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.2.20.08	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Penerangan Jalan	306.000.000,00	306.000.000,00	0,00	0,00	SE Nomor 971-7791 Tahun 2018
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Jaringan Irigasi	189.450.000,00	189.450.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	6.643.502.000,00	5.917.172.000,00	(726.330.000,00)	(10,93)	
5.2.2.21.01	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	919.113.000,00	919.113.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	5.374.389.000,00	4.648.059.000,00	(726.330.000,00)	(13,51)	
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.21.04	Belanja Jasa Konsultansi Hukum	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	50.371.510.000,00	59.310.618.000,00	8.939.108.000,00	17,75	
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	50.371.510.000,00	59.310.618.000,00	8.939.108.000,00	17,75	
5.2.2.23	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	11.524.406.000,00	20.595.863.500,00	9.071.457.500,00	78,72	
5.2.2.23.01	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	11.516.156.000,00	15.127.613.500,00	3.611.457.500,00	31,36	
5.2.2.23.02	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	8.250.000,00	5.468.250.000,00	5.460.000.000,00	66.181,82	
5.2.2.24	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	7.113.500,00	7.113.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.24.01	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat	7.113.500,00	7.113.500,00	0,00	0,00	
5.2.2.25	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	10.208.822.000,00	25.123.075.186,00	14.914.253.186,00	146,09	
5.2.2.25.01	Belanja yang bersumber dari Dana Kapitasu Jaminan Kesehatan Nasional	10.208.822.000,00	25.123.075.186,00	14.914.253.186,00	146,09	
5.2.2.26	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.763.635.000,00	7.281.175.000,00	(482.460.000,00)	(6,2)	
5.2.2.26.01	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	7.412.035.000,00	6.809.725.000,00	(602.310.000,00)	(8,13)	
5.2.2.26.02	Moderator	351.600.000,00	471.450.000,00	119.850.000,00	34,09	
5.2.2.27	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	293.636.000,00	331.906.000,00	38.270.000,00	13,03	
5.2.2.27.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	293.636.000,00	331.906.000,00	38.270.000,00	13,03	
5.2.2.28	Belanja Barang dan Jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik	40.996.000.000,00	37.022.775.000,00	(3.973.225.000,00)	(9,69)	
5.2.2.28.01	Belanja Operasional Kesehatan	40.996.000.000,00	36.616.075.000,00	(4.379.925.000,00)	(10,68)	
5.2.2.28.02	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	
5.2.2.28.03	Belanja Operasional Penyelenggaraan Kesenian	0,00	391.100.000,00	391.100.000,00	0,00	
5.2.2.29	Belanja Jasa Distribusi/Angkutan	785.371.450,00	785.371.450,00	0,00	0,00	
5.2.2.29.01	Belanja Jasa Distribusi	785.371.450,00	785.371.450,00	0,00	0,00	
5.2.2.30	Belanja Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.867.638.900,00	2.114.088.900,00	246.450.000,00	13,20	
5.2.2.30.01	Jasa Pegawai Honorer/Tidak Tetap	1.867.638.900,00	2.114.088.900,00	246.450.000,00	13,20	
5.2.3	Belanja Modal	421.772.089.650,00	463.277.463.630,00	41.505.373.980,00	9,84	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.06	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan	135.000.000,00	40.932.000,00	(94.068.000,00)	(69,68)	
5.2.3.06.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Tambak	135.000.000,00	40.932.000,00	(94.068.000,00)	(69,68)	
5.2.3.10	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Pengguna Lain	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.10.01	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Penggalian	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.11.04	Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.16.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penarik	9.625.000,00	9.625.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	7.892.273.500,00	4.457.982.500,00	(3.434.291.000,00)	(43,51)	
5.2.3.17.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	5.320.082.000,00	1.815.685.000,00	(3.504.397.000,00)	(65,87)	
5.2.3.17.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	610.000.000,00	610.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.17.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.462.191.500,00	1.532.297.500,00	70.106.000,00	4,79	
5.2.3.18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	180.480.000,00	180.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.18.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	180.480.000,00	180.480.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	3.251.000.000,00	3.251.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.23.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Ukur, Gip & Feting	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	66.030.000,00	68.630.000,00	2.600.000,00	3,94	
5.2.3.24.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal	66.030.000,00	66.030.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.24.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
5.2.3.25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan	0,00	153.308.000,00	153.308.000,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASARHUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.25.08	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi Perikanan	0,00	153.308.000,00	153.308.000,00	0,00	
5.2.3.26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	22.490.000,00	22.490.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.26.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan	22.490.000,00	22.490.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	175.648.000,00	110.648.000,00	(65.000.000,00)	(37,01)	
5.2.3.27.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.27.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah	81.000.000,00	16.000.000,00	(65.000.000,00)	(80,25)	
5.2.3.27.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	81.648.000,00	81.648.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.616.579.000,00	5.443.289.000,00	826.710.000,00	17,91	
5.2.3.28.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair	3.044.806.000,00	3.782.926.000,00	738.120.000,00	24,24	
5.2.3.28.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih	119.818.000,00	191.818.000,00	72.000.000,00	60,09	
5.2.3.28.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin	648.334.000,00	664.924.000,00	16.590.000,00	2,56	
5.2.3.28.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur	667.136.000,00	667.136.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.28.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran	132.985.000,00	132.985.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	6.210.632.600,00	22.074.819.600,00	15.864.187.000,00	255,44	
5.2.3.29.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	3.494.964.600,00	19.034.809.600,00	15.539.845.000,00	444,64	
5.2.3.29.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	29.581.000,00	29.581.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.29.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer	207.365.000,00	404.365.000,00	197.000.000,00	95,00	
5.2.3.29.05	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	1.768.942.000,00	1.868.784.000,00	99.842.000,00	5,64	
5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan	699.780.000,00	727.280.000,00	27.500.000,00	3,93	
5.2.3.30	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	243.547.000,00	434.247.000,00	190.700.000,00	78,30	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.30.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat	58.748.000,00	249.448.000,00	190.700.000,00	324,61	
5.2.3.30.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat	13.459.000,00	13.459.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	21.624.000,00	21.624.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat	24.376.000,00	24.376.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	55.340.000,00	55.340.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.30.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	1.651.815.000,00	1.661.178.000,00	9.363.000,00	0,57	
5.2.3.31.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.433.293.000,00	1.442.656.000,00	9.363.000,00	0,65	
5.2.3.31.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31.04	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak	176.432.000,00	176.432.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.31.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur	10.090.000,00	10.090.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	134.605.000,00	209.605.000,00	75.000.000,00	55,72	
5.2.3.32.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	53.285.000,00	128.285.000,00	75.000.000,00	140,75	
5.2.3.32.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	81.320.000,00	81.320.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	3.336.000,00	0,00	(3.336.000,00)	(100,00)	
5.2.3.33.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola	3.336.000,00	0,00	(3.336.000,00)	(100,00)	
5.2.3.34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	52.459.404.059,00	47.781.939.596,00	(4.677.464.463,00)	(8,92)	
5.2.3.34.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum	52.241.506.559,00	47.530.368.596,00	(4.711.137.963,00)	(9,02)	
5.2.3.34.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana	217.897.500,00	251.571.000,00	33.673.500,00	15,45	
5.2.3.35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	476.670.000,00	476.670.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.35.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan	408.000.000,00	408.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.35.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga	68.670.000,00	68.670.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.36	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	1.016.851.034,00	592.323.820,00	(424.527.214,00)	(41,75)	
5.2.3.36.12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum	737.613.034,00	313.085.820,00	(424.527.214,00)	(57,55)	
5.2.3.36.47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A	279.238.000,00	279.238.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.37	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	81.719.847.000,00	16.075.257.000,00	(65.644.590.000,00)	(80,33)	
5.2.3.37.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika	0,00	147.000.000,00	147.000.000,00	0,00	
5.2.3.37.03	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar	0,00	344.400.000,00	344.400.000,00	0,00	
5.2.3.37.07	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi: IPS	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	0,00	
5.2.3.37.09	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan	0,00	10.584.000.000,00	10.584.000.000,00	0,00	
5.2.3.37.10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian	0,00	2.528.000.000,00	2.528.000.000,00	0,00	
5.2.3.37.11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga	0,00	2.387.857.000,00	2.387.857.000,00	0,00	
5.2.3.37.13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain	81.719.847.000,00	0,00	(81.719.847.000,00)	(100,00)	
5.2.3.42	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.167.600.000,00	1.060.000.000,00	(107.600.000,00)	(9,22)	
5.2.3.42.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Kual itas Air dan tanah	1.167.600.000,00	1.060.000.000,00	(107.600.000,00)	(9,22)	
5.2.3.48	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	67.270.000,00	0,00	(67.270.000,00)	(100,00)	
5.2.3.48.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan	67.270.000,00	0,00	(67.270.000,00)	(100,00)	
5.2.3.49	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	71.259.362.657,00	123.725.179.234,00	52.465.816.577,00	73,63	
5.2.3.49.01	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	27.789.852.800,00	28.489.045.100,00	699.192.300,00	2,52	
5.2.3.49.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi	17.273.234.000,00	17.475.074.000,00	201.840.000,00	1,17	
5.2.3.49.06	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	10.727.377.257,00	23.443.756.934,00	12.716.379.677,00	118,54	
5.2.3.49.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah	2.080.921.100,00	2.580.921.100,00	500.000.000,00	24,03	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASARHUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.49.09	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	306.201.500,00	306.201.500,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.10	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	4.365.366.000,00	42.713.770.600,00	38.348.404.600,00	878,47	
5.2.3.49.12	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	5.009.930.000,00	5.009.930.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.16	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik	1.769.500.000,00	1.769.500.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.49.21	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	1.936.980.000,00	1.936.980.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.50	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	8.800.124.000,00	24.447.763.000,00	15.647.639.000,00	177,81	
5.2.3.50.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.890.645.000,00	2.480.649.700,00	589.984.700,00	31,21	
5.2.3.50.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III	3.470.840.000,00	18.061.096.000,00	14.590.256.000,00	420,37	
5.2.3.50.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	3.438.619.000,00	3.618.619.000,00	180.000.000,00	5,23	
5.2.3.50.08	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun	0,00	287.398.300,00	287.398.300,00	0,00	
5.2.3.57	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	39.286.000,00	39.286.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.57.02	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar	39.286.000,00	39.286.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.58	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.58.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Runway Identification Light(Rells)	33.900.000,00	33.900.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	112.603.879.900,00	124.168.978.158,00	11.565.098.258,00	10,27	
5.2.3.59.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	79.968.079.900,00	85.456.375.260,00	5.488.295.360,00	6,86	
5.2.3.59.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus	32.635.800.000,00	38.712.602.898,00	6.076.802.898,00	18,62	
5.2.3.60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	11.529.687.000,00	11.725.727.000,00	196.040.000,00	1,70	
5.2.3.60.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota	11.529.687.000,00	11.725.727.000,00	196.040.000,00	1,70	
5.2.3.61	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi	2.897.474.000,00	2.897.474.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.61.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi	2.897.474.000,00	2.897.474.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.62	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	12.570.090.000,00	16.421.609.200,00	3.851.519.200,00	30,64	
5.2.3.62.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut	12.570.090.000,00	16.421.609.200,00	3.851.519.200,00	30,64	
5.2.3.64	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Be	7.945.535.000,00	11.657.715.750,00	3.712.180.750,00	46,72	
5.2.3.64.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	456.299.000,00	456.299.000,00	0,00	
5.2.3.64.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai	7.945.535.000,00	11.201.416.750,00	3.255.881.750,00	40,98	
5.2.3.65	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
5.2.3.65.06	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air	0,00	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	
5.2.3.67	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor	11.881.742.000,00	10.796.642.000,00	(1.085.100.000,00)	(9,13)	
5.2.3.67.03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor	11.881.742.000,00	10.796.642.000,00	(1.085.100.000,00)	(9,13)	
5.2.3.68	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air	4.075.685.900,00	5.507.405.222,00	1.431.719.322,00	35,13	
5.2.3.68.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Tawar	4.075.685.900,00	5.507.405.222,00	1.431.719.322,00	35,13	
5.2.3.69	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	13.251.360.000,00	16.964.844.550,00	3.713.484.550,00	28,02	
5.2.3.69.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air	13.251.360.000,00	16.169.801.750,00	2.918.441.750,00	22,02	
5.2.3.69.05	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya	0,00	795.042.800,00	795.042.800,00	0,00	
5.2.3.71	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	201.840.000,00	0,00	(201.840.000,00)	(100,00)	
5.2.3.71.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	201.840.000,00	0,00	(201.840.000,00)	(100,00)	
5.2.3.79	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	2.562.120.000,00	3.322.215.000,00	760.095.000,00	29,67	
5.2.3.79.02	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi	2.562.120.000,00	3.322.215.000,00	760.095.000,00	29,67	
5.2.3.82	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku	353.100.000,00	7.063.100.000,00	6.710.000.000,00	1.900,31	
5.2.3.82.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	353.100.000,00	7.063.100.000,00	6.710.000.000,00	1.900,31	
5.2.3.85	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		DASAR HUKUM
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
5.2.3.85.02	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
5.2.3.87.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	(96.337.827.935,00)	(96.337.827.935,00)	0,00	
	PEMBIAYAAN DAERAH					
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
6.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
6.1.1.07	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
6.1.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.01	Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.01.01	BUMN	0,00	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00	96.337.827.935,00	96.337.827.935,00	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	

MASOHI, 16 Oktober 2019

KABUPATEN MALUKUTENGAH

MALUKUTENGAH